

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara, seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di bawah, menengah, maupun atas, baik dengan campur tangan pemerintah maupun tanpa campur tangan pemerintah (Astuti & Udyana, 2024). Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945, peningkatan ekonomi ini harus berdampak positif pada pembangunan nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat.

Negara berkembang Indonesia terus berupaya meningkatkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. (Ayu, 2020), Peningkatan pendapatan masyarakat di seluruh negara disebut pertumbuhan ekonomi, atau peningkatan nilai tambah secara keseluruhan. Agar pembangunan ekonomi berjalan lancar, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hal ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, yang mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan cara yang lebih optimal. Meningkatkan kegiatan perekonomian sebuah wilayah menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan fiskal adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah (Khadijah, 2018).

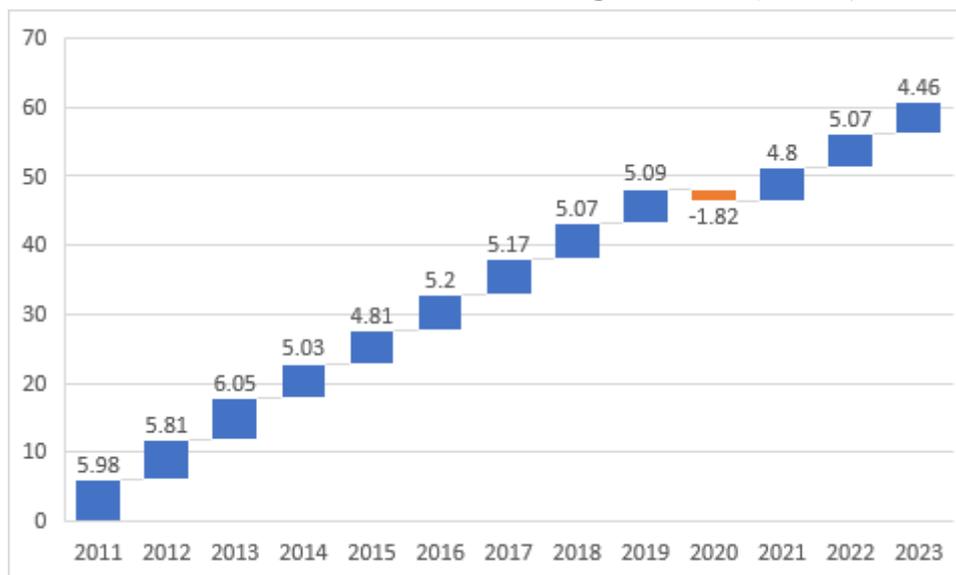
Selain itu, kebijakan fiskal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Untuk menangani ketimpangan ekonomi, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah dapat mengurangi disparitas ekonomi antara wilayah dan individu melalui redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran yang adil.

(Sari et al., 2024) Kebijakan fiskal Papua menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Intervensi fiskal ini sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Azhari et al., 2023). Dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan fiskal yang tepat. Dengan menampilkan barang-barang yang diproduksi oleh suatu wilayah, keberhasilan pembangunan di satu wilayah membantu pertumbuhan ekonomi (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Salah satu provinsi Indonesia adalah Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini berfluktuasi dari tahun 2011 hingga 2023. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dari tahun 2011 hingga 2023 cenderung fluktuatif, menurut data BPS. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan

yang terjadi tidak selalu menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang konsisten dalam ekonomi Kalimantan Barat. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dari tahun 2011 hingga 2023.

Gambar 1. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Persen)



Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat diolah, 2025

Gambar 1 menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 5,98 persen, tetapi turun menjadi 5,81 persen pada tahun 2012. Kemudian, naik menjadi 6,05% pada tahun 2013, pada 2014 mengalami penurunan sebesar 5,03 persen, tetapi kembali turun menjadi 4,81 persen pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi serta penurunan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, pemerintah, dan ekspor, serta penurunan ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada tahun 2016 dengan angka 5,2%, selanjutnya naik menjadi 5,17% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi hanya turun menjadi 5,0% pada 2018, kemudian naik lagi menjadi 5,09% pada 2019. Akibat pandemi COVID-19, ekonomi pada tahun 2020

mengalami penurunan signifikan hingga -1,82%, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, permintaan, dan gangguan rantai pasokan. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan kembali pulih menjadi 4,8% dan meningkat lagi menjadi 5,07% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan kembali menurun menjadi 4,46%, dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan permintaan, dan investasi di berbagai bidang.

Selama tiga belas tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan yang tidak konsisten. Menurut (Rantebua et al., 2020). Pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk kebijakan fiskal; berbagai perkembangan data ekonomi menunjukkan keadaan makroekonomi.

Pemerintah mengelola pajak dan pengeluaran negara melalui kebijakan fiskal untuk mengurangi fluktuasi dalam siklus ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat mencegah inflasi yang tinggi dan tidak stabil (Nurhayana¹ & Soebagiyo, 2023). Menurut tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan kebijakan fiskal dibagi menjadi kebijakan fiskal kontraktif dan ekspansif. Pengeluaran pemerintah dan pajak adalah komponen utama kebijakan fiskal (Aristina et al., 2018).

Proses penetapan pajak dan pengeluaran oleh pemerintah atau negara untuk mengurangi variasi dalam siklus bisnis dan ekonomi dikenal sebagai kebijakan fiskal (Dan et al., 2025). Ini berfungsi untuk stabilisasi pertumbuhan ekonomi, memastikan penggunaan tenaga kerja yang optimal, dan menjaga inflasi dan

pengangguran rendah (Nawawi & Irawan, 2010). Berbagai perubahan dalam manajemen anggaran pemerintah, termasuk manajemen pendapatan dan belanja pemerintah, menunjukkan dinamika perkembangan kebijakan fiskal (Nawawi & Irawan, 2010).

Dengan meningkatkan pengeluaran ekonomi secara keseluruhan, pemerintah dapat mengurangi pengangguran. Menurut Keynes, peningkatan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dia berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah menghasilkan peningkatan permintaan agregat, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Menurut Keynes ('Azizah Syadza et al., 2021)

Pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi ke daerah tanpa hasil langsung. Peraturan yang berlaku dapat mengubah kontribusi ini dan digunakan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah (Muslinawati, 2018). Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan fiskal. Pasalnya pajak merupakan kontributor tersebar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak memiliki dampak yang saling memengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong pengeluaran pemerintah lebih tinggi, yang dapat meningkatkan perekonomian dan menghasilkan

peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut Irsan Ashari S. (2006:35).

Belanja pegawai adalah biaya untuk kompensasi yang mencakup gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yusuf, 2018). Belanja pegawai adalah istilah yang mengacu pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi uang atau barang kepada seluruh pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai penghargaan atas pekerjaan mereka, kecuali untuk tugas yang berkaitan dengan belanja daerah. Belanja untuk barang dan jasa serta biaya tenaga kerja juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat fiskal (Nawawi & Irawan, 2010).

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah untuk dipergunakan membeli barang-barang dilingkungan pemerintah yang nilai kegunaannya kurang dari satu tahun dalam periode akuntansi serta penggunaan jasa dalam menjalankan dan melaksanakan program dan kegiatan pemerintah disuatu wilayah (PANGESTU, 2019). Belanja barang dan jasa dimaksudkan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di suatu wilayah. Pemerintah menggunakan belanja ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tanggung jawabnya, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, semakin besar jumlah uang yang

digunakan pemerintah untuk membeli barang dan jasa, semakin besar efeknya terhadap kegiatan ekonomi lokal dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal, menurut PP nomor 71 tahun 2010, didefinisikan sebagai belanja pemerintah daerah yang mendapatkan manfaat dari anggaran lebih dari satu tahun. Untuk membeli aset tetap yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode waktu, digunakan belanja modal. Menurut (Minarni, 2021), Pengeluaran yang digunakan untuk membeli, memperoleh, atau membangun aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan lebih dari dua belas bulan disebut sebagai belanja modal. Tanah, mesin, peralatan, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan lainnya adalah aset tetap. Infrastruktur, tanah, peralatan, gedung, bangunan, dan aset penting lainnya bagi pemerintah daerah diperoleh melalui belanja modal. Namun, aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual (Puspitasari, 2022) Jadi, belanja modal ini dapat meningkatkan pembangunan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian daerah. Namun, pendapatan daerah masih sedikit yang dialokasikan untuk belanja modal, tetapi dengan belanja modal ini, akan ada multiplier effect yang lebih besar.

Struktur APBD suatu daerah terdiri dari pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pajak termasuk dalam indikator penerimaan daerah, sementara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal termasuk dalam indikator belanja daerah. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan fiskal guna menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal lokal dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah membuat keputusan tentang pengeluaran dan pendapatan yang berpotensi mempengaruhi ekonomi melalui APBN tingkat provinsi, juga dikenal sebagai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keputusan ini dikenal sebagai kebijakan fiskal (Aqmarina & Furqon, 2020). Jika instrumen kebijakan fiskal mengalami masalah, kebijakan fiskal dianggap tidak efektif atau tidak optimal karena dapat menimbulkan efek negatif seperti menghambat efisiensi ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berbeda di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun kemandirian fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong tinggi perlu juga diimbangi dengan kebijakan fiskal yang baik dan efektif dalam pengelolaan anggaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, APBD harus sesuai dengan kebijakan fiskal dan prioritas nasional. Belanja daerah terus meningkat selama sebelas tahun terakhir. Menkeu menyatakan bahwa transfer dari pusat telah meningkat menjadi Rp770 triliun dari hanya sekitar Rp450 triliun pada tahun 2011. Menurut Menteri Keuangan, evaluasi dan penyesuaian kebijakan fiskal diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peneliti akan melakukan evaluasi dinamika kebijakan fiskal dan dampak penerapan kebijakan fiskal untuk perbaikan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal di daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, data dalam penelitian ini lebih terfokus pada tingkat provinsi, ada perbedaan tahun yang digunakan, dan variabel dan teknik analisis yang lebih difokuskan. Pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kebijakan fiskal dan dampaknya. Studi ini mencakup periode dari tahun 2011 hingga 2023. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Kalimantan Barat, dengan sampel semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Analisis regresi linier berganda dilakukan menggunakan model data panel *Fixed Effect Model*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Bachtiar et al., 2015) dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel yang digunakan. Untuk variabel yang digunakan yaitu belanja modal dan belanja pegawai Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel pendukung, lokasi, metode analisis data, dan tahun yang digunakan. Pada penelitian (Bachtiar et al., 2015) variabel pendukung yang digunakan belanja barang pembayaran utang dan subsidi untuk lokasi yang digunakan adalah Negara Indonesia, sementara untuk metode pendekatan yang digunakan analisis regresi linear berganda dengan data yang dipakai data time series dan tahun yang digunakan adalah tahun 1999-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2011 – 2023?
2. Apakah Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2011 – 2023?
3. Apakah Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2011 – 2023?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2011 – 2023?
5. Apakah Pajak Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 2011 – 2023 berpengaruh secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2011 hingga 2023.
2. Menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2011 hingga 2023.
3. Menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2011 hingga 2023.
4. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2011 hingga 2023.

5. Menganalisis pengaruh simultan pajak daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2011 hingga 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang relevan dan berfungsi sebagai referensi atau sumber acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan/stakeholder mengenai pengambilan kebijakan pada bidang makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Manfaat Bagi Universitas Bojonegoro

Hasil penelitian ini dapat menambah arsip kepustakaan Fakultas Ekonomi pada Progam Studi Ekonomi Pembangunan dan Universitas Bojonegoro.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian dan mencapai tujuan.

1. Penelitian ini menggunakan data berikut: pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi), pajak daerah (realisasi pajak daerah), belanja pegawai

(realisasi belanja pegawai), belanja barang dan jasa (realisasi belanja barang dan jasa), dan belanja modal.

2. Lokasi penelitian di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan sampel penelitian ditunjukkan dari data observasi dalam penelitian ini, yaitu pada tahun 2011-2023 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan kurun waktu 13 tahun dari tahun 2011-2023.
4. Perolehan data dari instansi terkait yaitu BPS Provinsi Kalimantan Barat serta DJPK Kemenkeu.